



Pranatan Anyar



PTKM TERUS DIEVALUASI

Satpol PP DIY Temukan 2.503 Pelanggaran

YOGYA (KR) - Kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di DIY belum bisa dikatakan efektif. Hal itu bisa dilihat dari masih ditemukan banyaknya pelanggaran atau ketidakpatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Bahkan selama PTKM diberlakukan, Satpol PP DIY masih menemukan 2.503 pelanggaran, 1.055 kasus di antaranya pelanggaran masker.

"Pelaksanaan PTKM terus kami evaluasi. Bahkan kemarin sempat dirapatkan dengan Menko Maritim secara daring, apakah akan diperpanjang atau ada modifikasi lain. Karena tujuan utama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PTKM adalah mengurangi mobilitas masyarakat, baik dari luar maupun dalam kota, dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19. Namun kenyataannya masih banyak aktivitas perjalanan antarkota," kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad, Senin (1/2).

Noviar mengatakan, edukasi dan

pembinaan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan penegakan prokes terus dilakukan. Pihaknya juga terus memberikan data-data kasus Covid-19 (data harian). Dengan mengetahui jumlah kasus yang masih tinggi, diharapkan masyarakat bisa menyadari bahwa Covid-19 nyata dan harus dicegah secara bersama-sama.

Disampaikan Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih, kasus terkonfirmasi Covid-19 harian di DIY, Senin, mengalami penambahan 222 kasus menjadi 22.047. Kasus

sembuh bertambah cukup signifikan 259 menjadi 15.340 kasus. Sedangkan kasus meninggal tambah tujuh kasus menjadi 515 kasus.

Berty menuturkan, penambahan kasus terkonfirmasi mayoritas 132 kasus dari hasil *tracing* kontak kasus positif, 59 kasus periksa mandiri, 29 kasus belum ada informasi riwayat serta masing-masing satu kasus dari skrining pasien dan perjalanan luar daerah.

"Jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 1.135 sampel dari 1.098 orang. Saat ini *case recovery rate* (CRR) atau tingkat kesembuhan mencapai 69,58 persen dan *case fatality rate* (CFR) atau tingkat fatalitas kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebesar 2,34 persen," jelasnya.

Sedangkan ketersediaan tempat tidur (TT) di 27 Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 DIY sudah untuk kritikal naik dari 76 bed menjadi 80 bed dan TT nonkritikal dari 642 bed menjadi 798 bed. **(Ria/Ira)-f**



KR-Zaini Anrosyid

Kapolres Temanggung membagikan masker dan mensosialisasikan prokes.

MASYARAKAT JANGAN LENGAH

Penerapan Prokes Lebih Digiatkan

TEMANGGUNG (KR) - Polres Temanggung membagikan masker secara gratis kepada warga di pusat-pusat perekonomian sambil mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan (prokes) untuk pengendalian penyebaran Covid-19, Senin (1/2).

Kapolres Temanggung AKBP Benny Setyowadi MSI mengatakan, diperlukan kontinuitas dalam penerapan prokes untuk mencegah penularan Covid-19. Dalam beberapa waktu terakhir, warga mulai kendor dalam menerapkan prokes, sehingga perlu digiatkan kembali.

"Polres terus mensialisasikan penerapan prokes dan bersama Pemda melakukan penegakan bagi warga yang kedapatan melanggar, seperti tidak memakai masker," kata Benny Setyowadi. Sasaran pembagian masker dan sosialisasi prokes di antaranya di sekitar terminal, toserba, dan Pasar Burung Kerkop Temanggung.

Kapolres berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat lebih taat dalam menerapkan prokes, karena pandemi Covid-19 belum berakhir.

Sementara itu soal pembiayaan mandiri swab PCR di Kabupaten Karanganyar masih tarik ulur. Bupati Karanganyar Juliyatmono merencanakan skema subsidi, namun kalangan DPRD minta dibiayai penuh Pemkab. Juliyatmono menyam-

paikan, pihaknya segera mematangkan rencana kerja sama dengan swasta yang memiliki fasilitas tes PCR agar bisa dimanfaatkan masyarakat untuk swab PCR secara mandiri.

Pemkab bakal memberi subsidi kepada masyarakat yang melakukan swab mandiri, untuk meringankan biaya swab PCR. "Kalau tes swab rata-rata Rp 900.000-Rp 1 juta, kalau yang dibiayai Pemerintah juga segitu. Tapi bagaimana swasta atau masyarakat yang pingin (swab) mandiri ini disubsidi Rp 100.000 atau berapa supaya lebih ringan," katanya.

Sedangkan Anggota Komisi IV DPRD Karanganyar Endang Muryani berharap biaya swab PCR digratiskan, daripada hanya diberi subsidi. "Kalau dibilang butuh, masyarakat butuh PCR. Ketika *tracing* dan harus PCR, masyarakat ada yang takut, ada yang *eman* uangnya. Jadi kalau bisa ya gratis saja," katanya.

Meski ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara ketat, namun jumlah pemakaman dengan standar protokol Covid-19 di Kabupaten Pati selama Januari 2021 masih cukup tinggi, sebanyak 123 pemakaman. Penggiat aksi sosial Pati Alman Eko Darmo mengatakan, hal itu menunjukkan masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap prokes. **(Osy/Lim/Cuk)-f**



KR-M Thoha

PULANG SEMENTARA: Seorang warga memperoleh pertolongan saat akan menaiki kendaraan yang membawanya ke kampung halamannya di Dusun Babadan 1, Paten, Dukun, Kabupaten Magelang, dari Tempat Evakuasi Akhir (TEA) Desa Banyurojo, Mertoyudan, Senin (1/2). Warga kelompok rentan dari dusun tersebut pulang sementara ke rumah masing-masing setelah merasa aman sambil menunggu perubahan status aktivitas Gunung Merapi. Beritanya di halaman 1.

RINGKANKAN BEBAN DEBITUR

Restrukturisasi Kredit Bisa Dilakukan Berulang

JAKARTA (KR) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, restrukturisasi kredit bisa dilakukan secara berulang selama periode relaksasi hingga Maret 2022, untuk meringankan beban debitur yang belum pulih dari dampak pandemi sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

"Apabila masih diperlukan dengan tidak dikenakan biaya berlebihan kepada debitur agar ini bisa cepat bangkit," kata Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dalam jumpa pers virtual bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (1/2).

OJK mencatat hingga 4 Januari 2021, kredit perbankan yang direstrukturisasi oleh 101 bank mencapai Rp 971 triliun dengan nasabah sebanyak 7,6 juta debitur. Mereka terdiri dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebanyak 5,8 juta debitur dengan nilai mencapai Rp

386,6 triliun dan non-UMKM sebanyak 1,76 juta debitur dengan nilai Rp 584,4 triliun.

Sedangkan hingga 25 Januari 2021, perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi mencapai Rp 191,58 triliun dari 5 juta kontrak pembiayaan yang disetujui. Adapun restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan hingga April 2022. "OJK ingin agar pemulihan bisa lebih cepat. Kami dorong agar prioritas dalam kebijakan kita ini terkonsentrasi dan terukur untuk kredit yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya.

Wimboh menjelaskan, stabilitas sistem keuangan hingga Desember 2020 tetap stabil dengan rasio permodalan yang masih kuat mencapai 23,84 persen. Selain itu, tingkat likuiditas perbankan juga masih berlimpah dan tidak ada masalah serta rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga mencapai 3,06 persen. "Semua memberikan keyakinan sektor keuangan

bisa bertahan pada masa pandemi," katanya.

OJK, lanjut Wimboh, juga menurunkan bobot risiko untuk kredit pembiayaan properti dan kendaraan bermotor misalnya dari 100 akan diturunkan menjadi lebih rendah. Namun, Wimboh belum memberikan detailnya dan akan disampaikan dalam kesempatan terpisah.

OJK, kata Wimboh, melakukan penyesuaian batas maksimum pemberian kredit dan penurunan bobot risiko kredit untuk sektor kesehatan. Regulator ini akan mempercepat akses pembiayaan khususnya bagi pelaku UMKM dengan perluasan ekonomi digital dari hulu ke hilir termasuk lembaga keuangan mikro dan BPR.

Di sisi lain, OJK akan memberikan status *sovereign* bagi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) agar memberikan keleluasaan lebih luas kepada LPI apabila memerlukan transaksi di sektor keuangan. **(Ant)-f**

BANK SYARIAH INDONESIA DIRESMIKAN

Presiden: Harus Bisa Sejahterakan Umat

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) berkontribusi besar terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi saat meresmikan bank tersebut, di Istana Negara, Senin (1/2).

"Saya menaruh harapan besar agar Bank Syariah Indonesia memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah yang menyejahterakan umat dan seluruh rakyat Indonesia," ujar Presiden.

Mendampingi Presiden pada kegiatan tersebut, antara lain, Wapres KH Ma'ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri BUMN Erick Thohir serta Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk Hery Gunardi.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, Presiden menyampaikan empat pesan pada bank hasil penggabungan tiga bank syariah ini, yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah dan

BNI Syariah.

Pertama, ujar Presiden, BSI harus menjadi bank syariah yang universal. Artinya harus terbuka, inklusif dan menyambut baik siapapun yang ingin menjadi nasabah agar jangkauan lebih banyak masyarakat di Tanah Air. "Jadi jangan berpikir Bank Syariah ini hanya untuk umat muslim saja, yang nonmuslim pun harus diterima dan disambut baik menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia. Semua yang mau bertransaksi atau berinvestasi secara syariah harus disambut sebaik-baiknya," pesan Presiden.

Kedua, BSI harus bisa memaksimalkan penggunaan teknologi digi-

tal. Digitalisasi ini wajib agar bisa menjangkau mereka yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan. Ketiga, BSI harus menarik minat generasi muda milenial untuk menjadi nasabah, karena jumlah generasi muda milenial Indonesia saat ini mencapai 25,87 persen dari total 270 juta penduduk Indonesia. "Keempat, produk dan layanan keuangan syariah ini harus kompetitif, harus memenuhi kebutuhan berbagai segmen konsumen, mulai dari UMKM, korporasi, sampai ritel dan mampu memfasilitasi nasabah agar cepat naik kelas dan menjadi tulang punggung ekonomi negara kita Indonesia," ujarnya.

Kepala Negara menekankan agar BSI mampu menjadi barometer perbankan syariah di Indonesia bahkan hingga tingkat global serta mampu menciptakan tren baru. Diharapkan BSI jeli dan gesit menangkap peluang. **(Sim/Lmg)-f**

UNTUK YANG KESEMBILAN KALINYA

Tanggap Darurat DIY Kembali Diperpanjang

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana Covid-19 di DIY. Perpanjangan status tanggap darurat tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 28/KEP/2021, yang diberlakukan selama sebulan mulai 1 hingga 28 Februari 2021.

"Di tengah pelaksanaan kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), Pemda DIY kembali memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat bencana Covid-19. Kebijakan perpanjangan ini sudah kesembilan kalinya diberlakukan. Seperti sebelumnya, perpanjangan status tanggap darurat diterapkan karena tren penularan Covid-19 di DIY masih tinggi. Perpanjangan status dilakukan untuk kesinambungan penanganan dan mengantisipasi adanya dampak Covid-19," jelas Sekda DIY Drs K Baskara Aji MM di Kepatihan, Yogyakarta, Senin (1/2).

Sekda DIY mengatakan, meski edukasi dan pengawasan terkait penegakan protokol kesehatan (prokes) terus dilakukan, namun semua itu belum sepenuhnya diimbangi kesadaran masyarakat dalam penegakan prokes. Hal itu bisa dilihat dari sebagian masyarakat masih

abai dalam penegakan prokes, meski kebijakan PTKM sudah diberlakukan.

Kondisi tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap penambahan kasus Covid-19. "Saat ini penularan kasus Covid-19 tidak hanya terjadi di lingkungan perkantoran, tapi sudah mengarah ke kelompok-kelompok kecil, seperti keluarga dan tetangga. Salah satu penyebabnya karena penegakkan prokes yang belum optimal. Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat kalau keluar rumah pakai masker tapi kalau di dalam rumah tidak memakai masker," ungkapnya.

Baskara Aji mengungkapkan, untuk mengatasi hal itu, sejumlah upaya terus dilakukan Pemda DIY. Salah satunya dengan meminta Satpol PP untuk mengintensifkan koordinasi dengan kabupaten/ kota terkait persiapan pembatasan wilayah di tingkat RT/RW dan desa. Karena kebijakan itu dinilai efektif untuk mengurangi penularan Covid-19 seperti yang dilakukan saat awal-awal pandemi di DIY.

"Saat ini pendirian posko yang mengawasi mobilitas masyarakat tidak banyak lagi. Padahal kalau diberlakukan kembali diharapkan bisa mengurangi mobilitas masyarakat, termasuk dari luar daerah," terangnya.

(Ria)-f